

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 18 Februari 2009

Subyek :

Hari : Rabu

Kata Kunci :

Halaman : 13

Lebih Dominan Soal Lingkungan

Gangguan yang timbul di sektor pertanian dan perikanan saat ini masih lebih dominan akibat perubahan lingkungan daripada perubahan iklim. Akan tetapi, pemerintah justru lebih mencurahkan perhatian pada isu perubahan iklim global sampai terjerumus utang luar negeri.

"Harus lebih berhati-hati melihat isu perubahan iklim. Ada faktor perubahan lingkungan yang jauh lebih mengganggu produktivitas pertanian dan perikanan daripada perubahan iklim itu sendiri," kata pakar hidrologi sumber daya air Institut Pertanian Bogor (IPB), Hidayat Pawitan, Selasa (17/2).

Hidayat pekan lalu diminta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menyampaikan tanggapan atas pemaparan kebijakan dan strategi dampak perubahan iklim bagi sektor pertanian. Menurut dia, pemerintah saat ini terlalu membesar-besarkan masalah perubahan iklim.

"Merunut keputusan Protokol Kyoto, Indonesia belum diwajibkan menurunkan emisi. Namun, Indonesia sudah terjebak utang ke luar negeri untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersebut," kata Hidayat.

Saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengedarkan proposal "Rencana Pembangunan Nasional: Jawaban Indonesia terhadap Perubahan Iklim" ke negara-negara industri.

Hingga Desember 2008, dari pengajuan proposal itu diperoleh utang dari Jepang 300 juta dollar AS dan dari Perancis 200 juta dollar.

Menurut Hidayat, utang negara ke luar negeri melalui proposal perubahan iklim itu menunjukkan pemerintah terjerumus dan terjebak pada isu perubahan iklim.

Padahal, gangguan produktivitas masyarakat di bidang pertanian dan perikanan sesungguhnya lebih dominan akibat perubahan lingkungan. Misalnya banjir dan tanah longsor, dapat diketahui dari peningkatan koefisien limpasan air hujan. Pada perubahan lingkungan hutan alam menjadi pertanian atau permukiman, koefisien limpasan air hujan meningkat sangat drastis.

"Perubahan lingkungan jauh lebih penting diperhatikan sehingga program-program yang mengarah pada kepentingan masyarakat petani atau rakyat kecil itu lebih nyata," kata Hidayat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto mengatakan, menghadapi perubahan iklim yang diwacanakan, saat ini masih lebih banyak sekadar membicarakan program dari pada menjalankannya secara nyata dan berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur untuk irigasi sejak beberapa tahun sampai sekarang juga belum berjalan," kata Gatot.

Kepala Bidang Analisa Klimatologi dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Soetanto mengatakan, pemahaman perubahan iklim juga kerap rancu dengan istilah variabilitas iklim. Seperti hujan deras yang cukup ekstrem dan mengakibatkan banjir serta longsor di berbagai tempat sering dianggap sebagai dampak perubahan iklim, padahal itu sebagai variabilitas iklim.

"Roadmap"

Sementara itu, inisiatif Pemerintah Indonesia melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau pemanasan global di sektor kelautan disetujui oleh Program Lingkungan PBB (UNEP).

Direktur Eksekutif UNEP Ahim Steiner mengajak pihak Indonesia membuat peta jalan (roadmap) mengangkat isu kelautan pascapenyelenggaraan World Ocean Conference (WOC) untuk dibawa ke COP-15 UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember mendatang. Pada saat COP, Indonesia bersama UNEP akan menggelar Ocean Day.

Hal ini disampaikan Sekretaris Menko Kesra Indroyono Soesilo, Selasa, selaku anggota delegasi RI pada pertemuan ke-25 Dewan Pengarah (Governing Council) UNEP di Nairobi, Kenya.